



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUFIARTI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 843520

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.566.000.000

1. Tanah Seluas 2545 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI  
Rp. 555.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.  
1.274.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/30 m2 di KAB / KOTA  
LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA  
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/150 m2 di KAB / KOTA  
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.055.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 130.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
130.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 51.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.747.000.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 5.747.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.